

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penulis akan memaparkan sebuah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memaparkan atas hubungan kenegaraan antara Turki dengan China yang disusul oleh penjelasan singkat Konflik Xinjiang serta respon Turki terhadap konflik tersebut. Kemudian merumuskan rumusan masalah, kerangka pemikiran dengan teori *Rational Choice*, tujuan penelitian, hipotesa, ruang lingkup penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Di dalam dunia kontemporer saat ini, hubungan antar negara merupakan suatu aktivitas yang harus dilakukan suatu negara untuk membangun negaranya. Hubungan antar negara dapat meliputi berbagai bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi dan keamanan yang dapat memajukan negara tersebut. Salah satu bentuk hubungan antar negara ialah hubungan bilateral. Hubungan bilateral merupakan hubungan yang dilakukan oleh dua negara. Salah satu contoh hubungan bilateral yang terjalin di kancah dunia ialah hubungan bilateral antara Turki dengan China.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan Turki China telah dimulai sejak tahun 1971. Namun, kedua negara tidak mempunyai hubungan yang dekat pada tahun 1970-an. Kemudian pada

tahun 1980an hubungan keduanya mengalami peningkatan yang baik. Pada tahun 2000, kunjungan kenegaraan antara keduanya mengalami peningkatan<sup>1</sup>.

Pada Januari 2003, ketika Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) berkuasa, Recep Tayyip Erdogan, sebagai Ketua Umum Partai, melakukan kunjungan ke China. Erdogan mengadakan pembicaraan resmi untuk mengembangkan kerjasama politik dan perdagangan antara kedua negara. Keikutsertaan Menteri Keuangan Ali Babacan dan Menteri Perdagangan Luar Negeri Kürşat Tüzmen dalam kunjungan tersebut menunjukkan bahwa prioritas Turki adalah di bidang ekonomi<sup>2</sup>.

Di tahun berikutnya, kerja sama China dan Turki di bidang politik, ekonomi, militer dan lainnya semakin kuat<sup>3</sup>. Di bulan November 2004, Huang Ju, *Vice Premier of the State Council*, mengunjungi Turki. Dia bertemu dengan Presiden Ahmet Necdet Sezer di Ankara. Dalam kunjungan tersebut China berharap untuk bisa meningkatkan hubungan kerjasama yang sudah lama terjalin dengan Turki. Terutama di bidang kerjasama ekonomi dan perdagangan serta keamanan<sup>4</sup>.

Kemudian dibalas oleh Menteri Luar Negeri Abdullah Gül yang melakukan kunjungan resmi ke China pada bulan Februari 2005. Selama kunjungan tersebut, masalah yang dimasukkan dalam agenda ialah ekonomi. Abdullah Gul, mencatat

---

<sup>1</sup> Selcuk Colakoglu, *Turkey-China : Rising Partnership*, hal 37.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Embassy of The People's Republic of China in The Republic of Turkey, *China-Turkey relations in 2004*, <http://tr.china-embassy.org/eng/ztx/t210767.html>, Diakses pada 21 December 2016

<sup>4</sup> Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, *Huang Ju Meets with Turkish President Ahmet Necdet Sezer*, <http://tr2.mofcom.gov.cn>, diakses pada 25 Desember 2016

bahwa ada potensi besar pada hubungan ekonomi antara kedua negara, Gül mengatakan bahwa delegasi Turki di China untuk memanfaatkan potensi ini melalui diskusi yang produktif. Gül, mencatat bahwa Turki dan China bisa bekerja sama dalam berbagai bidang, mengundang pengusaha China untuk mengunjungi Turki<sup>5</sup>.

Penasihat Negara China Hua Jianmin melakukan kunjungan pada 21 April 2006 ke Turki dan bertemu dengan Menteri Negara Turki dan Wakil Perdana Menteri Mehmet Ali Sahin. Dalam kunjungan tersebut kedua representative bersumpah untuk lebih memperkuat hubungan kerjasama di berbagai bidang antara kedua negara. Selama pertemuan mereka, Hua mengatakan bahwa hubungan antara China dan Turki telah berkembang sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik lebih dari 30 tahun yang lalu. Kedua belah pihak telah menyaksikan politik saling percaya, kepentingan ekonomi yang sama dan kerjasama yang luas<sup>6</sup>.

Ditahun berikutnya sebanyak 150 anggota delegasi perdagangan Turki berangkat ke China untuk menghadiri *China International Fair for Investment and Trade* (CIFIT) ke-11 pada 8 sampai 11 September 2007 di kota pelabuhan China timur dari Xiamen. Berbicara pada konferensi pers sebelum kunjungan, Menteri Negara Turki Kursad Tuzmen, kepala delegasi, mengatakan bahwa Turki

---

<sup>5</sup> Turkish Daily News, <http://web.hurriyetdailynews.com/gul-says-no-enmity-between-turkey-and-china.aspx?pageID=438&n=gul-says-no-enmity-between-turkey-and-china-2005-02-03/>, diakses pada 25 Desember 2016

<sup>6</sup>Xinhua News Agency, China, Turkey Vow to Strengthen Ties, [http://www1.china.org.cn/international/2006-04/22/content\\_1166479.htm](http://www1.china.org.cn/international/2006-04/22/content_1166479.htm), diakses pada 26 Desember 2016

berpartisipasi dalam CIFIT tahun ini sebagai *core country*. Sekitar 60 proyek dengan nilai total lebih dari US\$ 15 miliar dipublikasikan kepada investor dan kalangan keuangan di pameran tersebut<sup>7</sup>. Di tahun 2009 Presiden Turki, Abdullah Gul, melakukan kunjungan ke China bersama 120 pebisnis Turki. Dan dalam kunjungan tersebut Turki dan China membahas tentang *telecoms, electronics and auto sector projects*<sup>8</sup>, serta menandatangani kontrak senilai 3 milyar US\$<sup>9</sup>.

Dari tahun 2003 hingga bulan Juni 2009. Berdasarkan penjelasan penulis diatas bisa dilihat bahwa hubungan kenegaraan Turki dan China berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa kunjungan kenegaraan diantara keduanya. Namun, dalam sebuah hubungan antar negara pasti ada saat dimana hubungan tersebut erat maupun terjadi ketegangan. Hal tersebut juga terjadi pada hubungan kedua negara Turki dengan China.

Pada tahun 2009 meletuslah konflik etnis di Urumqi, Provinsi Xinjiang. Demonstran etnis Uighur bentrok dengan pasukan polisi dan menyerang dengan keras etnis Han, yang menyebabkan kematian sekitar dua ratus orang. Insiden tersebut membawa masalah dan politik etnis Uighur China menjadi sorotan media internasional. Hal tersebut juga menyebabkan represi berat oleh negara China

---

<sup>7</sup> People's Daily, Large Turkish delegation to participate in China's trade fair, <http://en.people.cn/90001/90776/6256876.html>, diakses pada 26 Desember 2016

<sup>8</sup> France 24, Turkish PM Erdogan likens Xinjiang violence to 'genocide', <http://www.france24.com/en/20090710-turkish-pm-erdogan-xinjiang-violence-genocide-turkey-uyghurs-han-trade-beijing-china>, diakses pada 26 Desember 2016

<sup>9</sup> Emrullah Uslu, Ankara Anxiously Monitors the Xinjiang Crisis, <http://jamestown.org/program/ankara-anxiously-monitors-the-xinjiang-crisis/>, diakses pada 27 Desember 2016

terhadap rakyat Uighur<sup>10</sup>. Pada hari itu, ratusan orang Uighur di Urumqi pergi untuk memprotes kematian dua pekerja Uighur di sebuah pabrik di China Selatan, dan demonstrasi segera berubah menjadi kerusuhan mematikan<sup>11</sup>. Selain itu pemicu konflik lainnya adalah adanya migrasi oleh etnis Han yang membuat Uighur sulit mendapatkan lahan kerja di wilayah kaya minyak tersebut, sebagaimana penanganan kasus aparat hukum China dianggap membela kaum mayoritas (Han) dengan Uighur ketika bentrok pekerja pabrik<sup>12</sup>.

Xinjiang merupakan salah satu daerah yang terdapat di China yang terletak di Jantung Asia, yang dimana sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan, stepa dan gurun. Xinjiang dibagi antara Muslim (sebagian besar siapa berbicara bahasa Turki - Tajik, yang berhubungan dengan bahasa Persia, menjadi pengecualian utama) dan imigran China Han, China Han merupakan penduduk mayoritas China<sup>13</sup>.

Hubungan antara etnis Han dan Uighur sudah lama tegang. Banyak orang Uighur melihat orang-orang Han didatangkan ke Urumqi, dan kota-kota lain di Xinjiang untuk memperkuat kendali Beijing atas Xinjiang. Populasi Warga Han saat ini mencapai 40 persen penduduk provinsi tersebut. Sementara itu, orang

---

<sup>10</sup> Han, E., Boundaries, Discrimination, and Interethnic Conflict in Xinjiang, China. *International Journal Of Conflict and Violence*, hal. 245.

<sup>11</sup> Simon Elegant & Austin Ramzy, *China's War in the West*, <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1909460,00.html>, diakses pada 29 Desember 2016.

<sup>12</sup> Rosyid, M., Menggugah peran hukum humaniter. *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 210.

<sup>13</sup> Dillon, M., *Ethnic, Religious and Political Conflict on China's Northwestern Borders: The Background to the Violence in Xinjiang*. IBRU Boundary and Security Bulletin Spring.

Uighur adalah muslim dan mereka memandang bahasa dan budaya lebih dekat dengan etnis Turki di Asia Tengah<sup>14</sup>.

Perdana Menteri Erdogan mengecam peristiwa tersebut sebagai “genosida” dan ditindaklanjuti dengan protes publik Turki di depan Kedutaan China di Ankara dan Istanbul. Salah satu demonstrasi yang berpusat di Caglayan Square menekan pemerintah Turki supaya bereaksi terhadap penindasan etnis Uyghur di Xinjiang. Mereka membawa bendera Turki dan menyerukan ikatan etnis, budaya dan agama antara Turki dan Uyghur. Protes besar ini dilakukan oleh etnis Uyghur yang tinggal di Turki dan publik Turki yang mendukung etnis Uyghur. Demonstrasi dan tuntutan terhadap pemerintah Turki untuk melakukan boikot terhadap China dibentuk oleh organisasi East Turkestan yang merupakan wadah asosiasi etnis Uyghur di Turki, yaitu East Turkestan Culture And Solidarity Association (DTKDD). Demonstrasi tersebut dilakukan di depan kedutaan China di Ankara. Demonstrasi lain dilakukan di Istanbul, diorganisir oleh organisasi ultranasionalis Alperen Ocaklari, organisasi pemuda dari Great Union Party (BBP), partai sayap kanan Islamis Turki. Ribuan orang melakukan protes di Caglayan Square di Istanbul dan berjalan hingga Konsulat China di Istanbul. Dalam protes tersebut, pemimpin Felicity Party atau Saadat Party yang merupakan partai Islamis yang anti Barat dan Israel, Numan Kurtumulus, memberikan pidato kecaman terhadap pemerintah China. Ia menyatakan bahwa apa yang terjadi di Xinjiang bukanlah konflik etnis, namun konflik agama, sehingga semua orang Muslim harus membela etnis Uyghur yang

---

<sup>14</sup> BBC Indonesia, Uighur Analysis, <http://www.bbc.co.uk>, diakses 1 Oktober 2016,

tertindas. Ia juga mendesak pemerintah untuk memanggil duta besar China dan memberikan peringatan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Partai Nationalist Great Union Party (BBP), Yalcin Topcu juga menggunakan momen tersebut untuk meminta pemerintah bereaksi atas tindakan pasukan militer China<sup>15</sup>.

Di bulan berikutnya, pada 31 Agustus 2017, Menteri Dalam Negeri Turki, Zafer Caglayan melakukan kunjungan ke China dan bertemu dengan Perdana Menteri China, Wen Jiabao. Dalam pertemuan tersebut kedua wakil negara berdiskusi tentang Konflik di Xinjiang. Dan dilanjutkan dengan kesepakatan kedua negara untuk menguatkan dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dengan berdasar prinsip saling menghormati, *equality* dan kepentingan.

Kedua negara terlihat jelas mempunyai hubungan yang baik dengan adanya kunjungan pada tahun 2010, Wen Jiabao, Perdana Menteri China, mengunjungi Turki dan membicarakan tentang kerjasama ekonomi diantara keduanya. Mereka direncanakan untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral dari senilai US\$ 17 miliar dalam 2010 sampai US\$ 50 miliar pada tahun 2015, dan US\$100 miliar pada 2020<sup>16</sup>. Pada tahun 2012 Badan Dukungan dan Promosi Investasi Turki melaporkan bahwa Turki dan China sepakat untuk membangun jalur kereta api berkecepatan tinggi antara Edirne dan Kars<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Felicia Amelia, Etnisitas dan Politik Luar Negeri: Respon Turki Terhadap Penindasan Etnis Uyghur di Xinjiang. Hal. 13.

<sup>16</sup> Zhiqiang Zou, Sino-Turkish Strategic Economic Relationship in New Era. ALTERNATIVES TURKISH JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS.

<sup>17</sup> Ergenc, Can Two Ends of Asia Meet? An Overview of Contemporary Turkey-China Relations. East-Asia.

Selain itu pada tahun 2012, Turki mendapat status sebagai *Dialogue Partner* di *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), Organisasi politik, ekonomi dan militer di Eurasia yang dibentuk pada tahun 2001, dimana anggotanya ialah Rusia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. Sebagai *Dialogue Partner* artinya Turki berhak untuk mengambil bagian dalam tingkat menteri dan beberapa pertemuan lain dari SCO, namun tidak memiliki hak suara<sup>18</sup>.

Dalam skripsi ini, penulis ingin menganalisis mengapa Hubungan Turki dengan China tidak dipengaruhi oleh Konflik yang terjadi di Xinjiang, yang masih mempunyai hubungan sejarah dengan Turki.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

*“Mengapa Pemerintah Turki tidak bereaksi negatif terhadap Konflik Xinjiang 2009 ?”*

## **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam mengkaji sebuah pengaruh yang ditimbulkan oleh Konflik Xinjiang di China terhadap hubungan antara Turki dan China, maka diperlukan seperangkat teori, dimana merupakan bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bias diduga akan terjadi. Jadi selain

---

<sup>18</sup> Peter Korzun, Major Foreign Policy Shift: Turkey Abandoning EU for SCO, [www.zerohedge.com/news/2016-11-22/major-foreign-policy-shift-turkey-abandoning-eu-sco](http://www.zerohedge.com/news/2016-11-22/major-foreign-policy-shift-turkey-abandoning-eu-sco), diakses pada 3 Februari 2017

dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadai dasar bagi prediksi<sup>19</sup>, yang tepat sebagai alat analisis sehingga dapat membantu dan menjadi bahan acuan agar penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah.

### **C.1. Teori *Rational Choice***

Menurut buku yang ditulis oleh Friedman, Pilihan Rasional merupakan sikap individu yang mempertimbangkan biaya dan keuntungan dalam membuat keputusan agar mendapatkan hasil maksimal. “...*an individual acts as if balancing costs against benefits to arrive at action that maximizes personal advantage*<sup>20</sup>.”

Dalam penerapan Teori Pilihan Rasional oleh sebuah negara, kepentingan nasional merupakan hal yang dijadikan patokan dalam menghitung untung ruginya dalam membuat keputusan. Lalu bagaimana kepentingan nasional Turki mempengaruhi respon Turki terhadap Konflik Xinjiang tahun 2009 akan dijelaskan menggunakan Teori Pilihan Rasional. Teori Pilihan Rasional pada dasarnya merupakan kristalisasi dari pemahaman perkembangan aliran pemikiran dari paham rasionalitas Eropa Barat, yaitu paham teori yang muncul pada abad pertengahan, sebagai antitesis atas pemikiran paham naturalis. Pilihan rasional sebagai model penjelasan dari tindakan-tindakan manusia, dimaksudkan untuk memberikan

---

<sup>19</sup> Mochtar Mas'oe'd, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT PustakaLP3ES.

<sup>20</sup> Ogu, M. I., Rational Choice Theory: Assumptions, Strengths, and Greatest Weaknesses in Application Outside the Western Milieu Context. Arabian Journal of Business and Management Review.

analisa formal dari pengambilan keputusan rasional berdasarkan sejumlah kepercayaan serta tujuan<sup>21</sup>.

Teori pilihan rasional sebagai sebuah pendekatan digunakan untuk memahami bagaimana elite politik menentukan kebijakan-kebijakan politik berdasarkan pertimbangan pilihan-pilihan rasional. Pilihan rasional merujuk pada perilaku manusia sebagai makhluk ekonomi, yang bertindak karena ada motivasi insentif. Teori ini menempatkan manusia sebagai makhluk rasional. Manusia rasional akan selalu dapat membuat peringkat pilihan sehingga dengan cara itu dapat diperbandingkan kelebihan dan kekurangannya. Meskipun peringkat pilihannya tersebut dapat berubah, tetapi ia selalu memilih alternative yang peringkatnya tertinggi dari rangkaian pilihannya itu dan selalu membuat pilihan yang sama setiap kali dihadapkan pada alternative yang sama. Rasionalitas merujuk pada proses tindakan, bukan pada hasil akhir atau bahkan keberhasilan dalam mencapai suatu keinginan<sup>22</sup>.

Teori Pilihan Rasional memiliki tiga elemen penting yaitu *methodological individualism*, *goal-seeking* atau *utility-maximization* dan *the existence of various institutional* atau *strategic constraints on individual choice*<sup>23</sup>. Yang pertama dari elemen-elemen ini, *methodological individualism*, berarti bahwa pilihan rasional analisis individu menempatkan individu sebagai unit dasar analisis sosial. Individu

---

<sup>21</sup> Jazilah, F. P., Susilo, D., & Eriyanti, L. D. , Kepentingan Nicolas Sarkozy Dalam Pembuatan Kebijakan Imigrasi di Perancis. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Pollack, M. A. , Rational Choice and EU Politics. Handbook Of European Union Politics, hal. 32.

tersebut merupakan seorang aktor rasional pembuat keputusan, dimana berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Para pembuat itu digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaanya. Mereka juga diasumsikan dapat memperoleh informasi yang cukup banyak terutama dalam suatu pemerintah yang monolit, tidak terpecah belah, sehingga dapat melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan dan dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan<sup>24</sup>. Individu dalam penelitian ini artinya ialah pemerintah Turki, merupakan aktor rasional di pemerintahan monolit, yang mana mempunyai wewenang dalam memutuskan suatu keputusan dalam menentukan respon Turki terhadap Konflik Xinjiang menjadi elemen individualisme metodologis.

Kedua, individu diasumsikan bertindak untuk dapat memaksimalkan fungsi mereka atau pencapaian tujuan walaupun dihadapkan pada kendala atau tekanan. Artinya, sebelum membuat keputusan, individu telah menetapkan tujuan yang diinginkan kemudian mencari dan menyusun tindakan-tindakan alternatif yang maksimal untuk tetap mencapai tujuan itu. Dalam penelitian ini, tujuan hubungan bilateral Turki adalah pencapaian Kepentingan Nasional Turki. Dalam kamus Hubungan Internasional karya Jack O. Plano dan Roy Olton, Kepentingan Nasional

---

<sup>24</sup> Mochtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta: PT PustakaLP3ES.

merupakan tujuan yang mendasar dan penentu utama yang memandu para pengambil keputusan negara dalam membuat Kebijakan Luar Negeri. Kepentingan Nasional suatu negara biasanya konsepsi yang sangat umum dari elemen-elemen yang merupakan kebutuhan paling vital negara. Ini termasuk perlindungan diri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Karena tidak ada satu "Kepentingan" yang mendominasi fungsi pembuatan kebijakan dari pemerintah, konsep mungkin lebih tepat disebut, dalam bentuk jamak, sebagai kepentingan nasional<sup>25</sup>.

Kepentingan nasional merupakan tujuan akhir dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan target utama yang harus dicapai oleh negara tersebut. Dengan kata lain, kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai kebutuhan negara yang bersifat penting yang kemudian mengarahkan para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negerinya<sup>26</sup>. Maka dari itu Pemerintah Turki menimbang apakah keputusan yang dibuat mampu mencapai Kepentingan Nasional Turki.

Ketiga dan terakhir, *the existence of various institutional* atau *strategic constraints on individual choice*. Hal ini berarti individu tidak langsung memutuskan sesuatu tetapi mencoba menimbang dan memilih dahulu tindakan alternatif yang ada, dengan mempertimbangkan keterbatasan lingkungan fisik dan

---

<sup>25</sup> Jack C. Plano, & Roy Olton, *The International Relation Dictionary*. Holt Rinchat and Winston Inc.

<sup>26</sup> Anak A.Perwita, & Yanyan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

sosial mereka. Dalam memutuskan bagaimana respon Turki, sebagai aktor tunggal pengambil keputusan, atas Konflik Xinjiang tersebut, Turki menganalisis berbagai kendala yang ada dan menghitung untung rugi dari keputusan yang akan diambilnya dalam merespon konflik.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah;

1. Menganalisa hubungan antara Turki dengan China
2. Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi motivasi peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang masalah yang serupa.

#### **E. Hipotesa**

Pemerintah Turki tidak bereaksi negatif terhadap Konflik Xinjiang tahun 2009 karena:

1. Secara Keamanan, akan memperoleh kesempatan lebih besar bagi Turki untuk mendapatkan dukungan dengan bergabung dalam SCO.
2. Secara Ekonomi, meningkatkan hubungan perdagangan Turki dan China.
3. Secara Prestise, menjaga citra baik Turki bagi China.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup dalam kurun waktu 10 tahun dimana dimulai dari tahun 2003, hal tersebut dikarenakan Turki mulai berada dalam kepemimpinan AKP (*Adelet ve Kalkinma Partisi*), hingga tahun 2013.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa kualitatif, dimana penulis mencoba untuk menjelaskan tentang masalah yang dibahas. Sedangkan Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, dimana penulis menggunakan data yang berasal dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel maupun berita dari Internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka ( *library research* ). Yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.